



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN AGUSTUS 2018

Pendahuluan

Komnas HAM merupakan lembaga pelayanan publik yang menjadi tempat permintaan perlindungan yang terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Korporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Agustus 2018, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 473 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

Kategori Berkas Kasus										Total
Berkas Kasus Baru 1x					Berkas Lanjutan					
PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	PMT	MDS	Tim	File	Perwakilan	
33	5		123	16	137	36		45	78	473

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	4	20	Kalimantan Barat	53
2	Sumatera Utara	39	21	Kalimantan Selatan	8
3	Bengkulu	5	22	Kalimantan Tengah	13
4	Jambi	7	23	Kalimantan Timur	8
5	Riau	9	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	9	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	12	26	Sulawesi Selatan	14
8	Lampung	4	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	13
10	Kepulauan Riau	2	29	Sulawesi Utara	4
11	Banten	12	30	Sulawesi Barat	
12	Jawa Barat	34	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	79	32	Maluku	25
14	Jawa Tengah	21	33	Maluku Utara	
15	Jawa Timur	45	34	Papua	3
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	5	35	Papua Barat	2
17	Bali	6	36	Tanpa Alamat	19
18	Nusa Tenggara Barat	3			
19	Nusa Tenggara Timur	10		Jumlah	473

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Pemantauan dan penyelidikan	261
2	Mediasi	43
3	Tim	
4	File	169
Jumlah		473

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	286
2	Tembusan	183
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	4
Jumlah		473

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	46
2	Pos	401
3	Fax	1
4	Email	15
5	Online	6
6	Audiensi	3
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	1
8	Jejaring Pengaduan	
Jumlah		473

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	15
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	6
4	Hak memperoleh keadilan	142
5	Hak atas kebebasan pribadi	9
6	Hak atas rasa aman	25
7	Hak atas kesejahteraan	167
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	9
9	Hak perempuan	4
10	Hak anak	
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	1
12	Non HAM	95
Jumlah		473

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	10
Lingkungan hidup	5
	15
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	5

Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	6
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	101
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	5
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	31
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	5
	142
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	5
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	9
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	2
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	1
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	4
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	3
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	7
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	8
	25
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	5
Hak atas kepemilikan tanah	66

Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	38
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	19
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	26
Hak atas kesehatan	9
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
	167
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	2
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	6
	9
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	4
	4
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	0
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	1
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	95
Jumlah Seluruh	473

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Korporasi	4
2	Lembaga pendidikan	2
3	Individu - Orang seorang	217
4	Individu - Anak	7
5	Individu - Perempuan	7
6	Individu - Buruh migran	5
7	Individu - Pekerja/Profesi	32
8	Individu - Suku	1
9	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	3
10	Individu - Lansia	1
11	Individu - Fakir Miskin	
12	Individu - Narapidana	3
13	Kelompok - Masyarakat	93
14	Kelompok - Pekerja	12
15	Kelompok - Masyarakat Adat	7
16	Kelompok - Ras dan Etnis	1
17	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	2
18	Kelompok - LGBT	1
19	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	6
20	Kelompok - Narapidana	1
21	Organisasi	1
22	Warga Negara Asing (WNA)	1
23	Tanpa Keterangan Pihak Korban	66

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah Berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	39
2	Pemerintah daerah	58
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (non kementerian)	4
5	Lembaga peradilan	29
6	POLRI	128
7	TNI	15
8	Kejaksaan	6
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	6
10	Pemerintah negara lain	
11	Korporasi	63
12	BUMN/BUMD	26
13	Lembaga pelayanan kesehatan	2

14	Lembaga pendidikan	7
15	Individu - Orang seorang	12
16	Individu - Pekerja/Profesi	2
17	Kelompok - Masyarakat	2
18	Kelompok - Masyarakat Adat	1
19	Organisasi	3
20	Warga Negara Asing (WNA)	2
21	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	67

Jakarta, 3 September 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim